

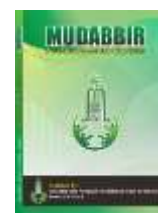


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Implikasi Kebijakan Sekolah Gratis Pada Kualitas Pendidikan di Madrasah Darul Aman Medan

Hanifa Azmi¹, Hotni Sari Harahap² Salmiah Nasution³

^{1,3}Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

²Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

Email: hanifa_azmi@yahoo.co.id¹, hotnisari46@gmail.com², lissaminst@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah gratis di MTs Darul Aman Medan, implikasinya terhadap kualitas pendidikan, serta tantangan yang dihadapi madrasah dalam menjaga kualitas pendidikan dalam konteks kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sekolah gratis di MTs Darul Aman Medan diterapkan melalui penghapusan SPP dan penggantian dengan iuran tahunan sebesar Rp250.000, serta peminjaman buku pelajaran, LKS, dan perlengkapan seragam kepada siswa. Implikasi dari kebijakan ini meliputi peningkatan partisipasi siswa, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan. Selain itu, terdapat penurunan motivasi guru akibat beban kerja tambahan tanpa kompensasi, evaluasi dan akreditasi yang kurang ketat, terbatasnya kegiatan ekstrakurikuler, serta persepsi masyarakat terhadap penurunan kualitas pendidikan karena status gratis. Kebijakan ini juga memberikan beban finansial bagi pemerintah dan yayasan. Tantangan yang dihadapi madrasah antara lain keterbatasan fasilitas, kurangnya guru berkualifikasi tinggi, perubahan kurikulum, lemahnya kerjasama, serta persaingan dengan sekolah lain.

Kata Kunci: *Kebijakan, Sekolah Gratis, Kualitas Pendidikan*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the free school policy at MTs Darul Aman Medan, its implications for education quality, and the challenges faced by the madrasah in maintaining education quality within the context of this policy. This study uses a qualitative descriptive approach with research subjects consisting of the school principal, teachers, and students. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the free school policy at MTs Darul Aman Medan is implemented through the elimination of tuition fees and their replacement with an annual fee of Rp250,000, as well as the lending of textbooks, workbooks, and uniform supplies to students. The implications of this policy include increased student participation, but this is not balanced by an improvement in the quality of educational resources. Additionally, there is a decrease in teacher motivation due to additional workloads without compensation, less stringent evaluations and accreditations, limited extracurricular activities, and public perception of declining educational quality due to the free status. This policy also imposes a financial burden on the government and the foundation. Challenges faced by madrasahs include limited facilities, a shortage of highly qualified teachers, curriculum changes, weak collaboration, and competition with other schools.

Keywords: Policy, Free Schooling, Quality of Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas hidup. Melalui pendidikan, seseorang dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan membentuk karakter, memperluas wawasan, serta mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera (Syaripudin, 2012). Baik melalui jalur formal, informal, maupun nonformal, pendidikan berperan besar dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul (Imam Gojali, 2011). Dalam konteks nasional, pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis (Syaripudin, 2012).

Salah satu kebijakan yang dicanangkan pemerintah Indonesia adalah program wajib belajar sembilan tahun dan pemberlakuan sekolah gratis. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan dasar tanpa terkendala masalah

biaya. Dengan kata lain, kebijakan sekolah gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah (Widyanto, 2022).

Kebijakan sekolah gratis juga diiringi dengan program pendanaan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS ini menysar sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah terdaftar di sistem Dapodik dan memenuhi sejumlah kriteria tertentu, termasuk akreditasi dan jumlah peserta didik. Dana BOS diharapkan dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk mendukung operasional pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan (Funfamily & Mukhlis, 2024).

Kendati demikian, implementasi kebijakan sekolah gratis tidak serta merta tanpa tantangan. Di lapangan, terdapat perbedaan dalam penerimaan dan pemanfaatan dana BOS antar sekolah, tergantung pada kapasitas manajemen, jumlah siswa, serta kebijakan internal masing-masing sekolah. Beberapa sekolah bahkan tetap memungut iuran atau biaya tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, sementara sekolah lain berupaya menjalankan kebijakan sekolah gratis secara penuh. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kualitas layanan pendidikan antar sekolah, terutama antara sekolah negeri dan swasta (Omeri, 2015).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum umum dan keagamaan juga turut merasakan dampak dari kebijakan sekolah gratis. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, madrasah tidak hanya bertanggung jawab dalam pembentukan aspek akademik peserta didik, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di madrasah tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari keberhasilan dalam membentuk karakter dan integritas siswa. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di madrasah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dana. Dana BOS yang diterima oleh madrasah sering kali tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional, terutama jika jumlah siswa tidak terlalu banyak. Akibatnya, madrasah harus mencari sumber pendanaan alternatif atau melakukan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri (Arianto, 2023).

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Madrasah, terutama yang berstatus swasta dan berada di wilayah pinggiran, sering kali mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan guru-guru yang kompeten karena keterbatasan anggaran untuk menggaji tenaga pendidik secara layak. Belum lagi persoalan fasilitas dan infrastruktur yang masih jauh dari memadai, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga perpustakaan (Mudlofir, 2016).

Kondisi semacam ini dialami oleh salah satu madrasah di Kota Medan, yaitu MTs Darul Aman Medan. Sebagai lembaga pendidikan yang mengimplementasikan kebijakan sekolah gratis, MTs Darul Aman berusaha memberikan akses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani orang tua dengan biaya pendidikan yang tinggi. Namun, dalam perjalanannya, kebijakan ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap proses pembelajaran dan kualitas pendidikan di madrasah tersebut (Ilham, 2019).

Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain adalah keterbatasan dalam pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, minimnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa, serta rendahnya motivasi guru akibat peningkatan beban kerja tanpa kompensasi yang memadai. Selain itu, terdapat persepsi dari sebagian masyarakat bahwa pendidikan gratis identik dengan rendahnya kualitas, yang berdampak pada citra madrasah di mata publik. Meski demikian, tantangan-tantangan tersebut bukan tanpa solusi. MTs Darul Aman Medan berupaya untuk mempertahankan eksistensinya melalui berbagai strategi, seperti memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan orang tua siswa, meningkatkan partisipasi dalam berbagai kompetisi akademik dan nonakademik, serta membangun program-program unggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa madrasah tetap menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi kebijakan sekolah gratis serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan di MTs Darul Aman Medan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan alami, berdasarkan pandangan dan pengalaman para informan. Menurut W. Creswell (2012) pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah manusia dan fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat naratif. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan responden, pengamatan terhadap situasi nyata, serta penelaahan dokumentasi yang relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara menyeluruh.

Penelitian ini berfokus pada satu lokasi, yaitu MTs Darul Aman Medan, dengan informan yang terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan guru-guru yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan sekolah gratis. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap mengetahui dan memahami objek penelitian secara mendalam. Sumber data

dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel, dan sumber pustaka lain yang mendukung topik penelitian (Creswell, 1998).

Untuk memperoleh data yang valid dan menyeluruh, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah data tertulis dan arsip yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dari lapangan ditranskrip, diseleksi, dikategorikan, dan kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi (Miles & Huberman, 2005). Proses ini berlangsung secara simultan dan berulang hingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan kondisi waktu yang berbeda, diharapkan diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis di MTs Darul Aman Medan

Kebijakan sekolah gratis merupakan salah satu langkah progresif pemerintah dalam mendukung akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di tengah ketimpangan ekonomi dan sosial, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan peluang yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk di lingkungan madrasah. MTs Darul Aman Medan adalah salah satu madrasah swasta yang mengimplementasikan kebijakan sekolah gratis secara langsung kepada peserta didiknya. Implementasi ini dilakukan dengan penghapusan iuran SPP serta peminjaman berbagai kebutuhan sekolah seperti buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), hingga perlengkapan seperti seragam olahraga dan rompi sekolah (Yuliah, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan pihak madrasah, sistem pembiayaan di MTs Darul Aman memang tidak sepenuhnya bergantung pada siswa. Peserta didik hanya dikenakan biaya tahunan sebesar Rp250.000, sementara kebutuhan belajar lainnya difasilitasi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dukungan dari

yayasan. Ketersediaan fasilitas dan sumber daya lainnya dibuka seluas-luasnya bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Guru-guru yang mengajar juga merupakan tenaga pendidik berkompeten meskipun menerima honor dalam kurun waktu tiga bulan sekali, menandakan adanya sistem manajemen keuangan yang masih terbatas (Hastuti & Soehartono, 2018).

Namun, meskipun akses pendidikan terbuka lebar, jumlah siswa yang mendaftar di MTs Darul Aman dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan penurunan. Hal ini diduga karena banyaknya sekolah baru di wilayah Medan yang juga menawarkan program serupa dengan fasilitas yang mungkin dianggap lebih menarik oleh masyarakat. Kompetisi antar sekolah semakin tinggi, dan madrasah seperti MTs Darul Aman harus mencari strategi baru untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul (Hariyadi, 2021).

Kebijakan sekolah gratis di madrasah ini juga menyentuh aspek kemanusiaan, di mana siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa rasa malu atau beban. Di balik kesederhanaannya, madrasah ini menempatkan prinsip pemerataan akses sebagai prioritas utama. Implementasi ini tidak hanya berdampak pada jumlah siswa, tetapi juga pada bagaimana sistem pengajaran diatur agar tetap berjalan maksimal di tengah keterbatasan dana dan sumber daya. Keberadaan kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa madrasah swasta pun mampu menjawab tantangan zaman jika dikelola dengan komitmen dan semangat keberlanjutan.

Implikasi Kebijakan terhadap Kualitas Pendidikan

Penerapan kebijakan sekolah gratis di MTs Darul Aman membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap kualitas pendidikan. Di satu sisi, madrasah berhasil memberikan ruang belajar bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang bervariasi, namun di sisi lain, kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa menjadi tantangan tersendiri. Dalam praktiknya, keberagaman motivasi dan kemampuan siswa membuat guru harus melakukan pendekatan yang lebih personal dan kreatif. Tidak semua siswa penerima manfaat kebijakan sekolah gratis memiliki semangat belajar yang tinggi, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang menganggap pendidikan hanya sekadar formalitas tanpa dukungan belajar di rumah (Suryadi & H.A.R Tilaar., 2003).

Implikasi lainnya terlihat pada aspek sarana prasarana dan dukungan akademik. Dana BOS yang diterima oleh madrasah cukup untuk operasional rutin, namun belum mampu menopang peningkatan kualitas guru atau pengembangan program pembelajaran yang lebih inovatif. Kegiatan ekstrakurikuler masih terbatas, dan pelatihan guru hanya dilakukan jika ada sponsor atau program dari pihak luar. Madrasah juga menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang kelas multimedia, yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran modern (Solichin, 2015).

Evaluasi pembelajaran, akreditasi, dan sistem pengukuran mutu pendidikan juga masih menghadapi keterbatasan. Pemeriksaan mutu belum dilakukan secara periodik dan menyeluruh, sehingga sekolah lebih fokus pada pencapaian administratif dibandingkan dengan evaluasi kualitas proses belajar mengajar secara mendalam. Dalam konteks ini, guru memiliki peran ganda: tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator, pengarah, bahkan konselor bagi siswa. Di tengah keterbatasan tersebut, tetap ada optimisme dari pihak sekolah yang merasa bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah membuahkan hasil, terlihat dari banyaknya lulusan madrasah yang berhasil melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, bahkan melalui jalur beasiswa (Bayani Situmorang et al., 2023).

Kebijakan sekolah gratis di MTs Darul Aman menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya bisa menjadi tempat belajar formal, tetapi juga tempat pembentukan karakter. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis nilai, madrasah mampu memberikan ruang bagi tumbuhnya siswa-siswa yang memiliki daya juang tinggi meskipun berada dalam lingkungan yang serba terbatas. Jika kebijakan ini terus dilanjutkan dan dibarengi dengan peningkatan dukungan anggaran serta evaluasi berkala, maka kualitas pendidikan di madrasah dapat terus meningkat, menjadikan lembaga ini sebagai motor pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tantangan yang Dihadapi dalam Menjaga Mutu Pendidikan

Meskipun kebijakan sekolah gratis memberikan banyak manfaat, MTs Darul Aman tetap menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga mutu pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada berbagai aspek operasional sekolah. Ketiadaan sumber dana tambahan selain dari BOS dan iuran tahunan menyebabkan sekolah harus sangat selektif dalam penggunaan anggaran. Fasilitas seperti laboratorium sains, ruang praktik komputer, dan sistem pembelajaran digital belum tersedia secara optimal. Ini menyebabkan proses pembelajaran masih sangat konvensional dan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi pendidikan saat ini (Rahmawati, 2016).

Keterbatasan ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan guru. Dengan sistem penggajian yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, tidak semua guru bisa merasa cukup dihargai secara finansial. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi mereka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, meskipun sebagian besar guru tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi. Di sisi lain, program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru juga belum menjadi prioritas karena keterbatasan dana. Guru dituntut untuk mandiri dalam mengembangkan kemampuan profesional mereka, sesuatu yang tidak mudah dilakukan tanpa dukungan institusi yang kuat (Iqbal & Yusran, 2021).

Tantangan lainnya adalah terkait pengelolaan kurikulum. MTs Darul Aman menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan khas madrasah.

Namun integrasi ini tidak selalu berjalan mulus. Ketimpangan antara muatan pelajaran umum dan pelajaran agama masih menjadi perdebatan internal. Di saat yang sama, siswa diharapkan mampu menguasai keduanya secara seimbang. Padatnya kurikulum dan waktu belajar yang terbatas sering kali menyebabkan siswa mengalami kelelahan akademik, apalagi jika tidak diimbangi dengan kegiatan pembinaan karakter dan rekreasi pendidikan yang memadai.

Selain dari dalam, tantangan juga datang dari luar. Persaingan dengan sekolah lain, baik negeri maupun swasta, semakin ketat. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan program unggulan sering kali menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini menuntut MTs Darul Aman untuk terus berinovasi dan membangun keunggulan tersendiri agar tetap dilirik oleh masyarakat. Namun untuk mewujudkan inovasi tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pengelola madrasah, guru, orang tua, serta masyarakat sekitar (Sanisah, 2015).

Partisipasi orang tua juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di madrasah masih sangat minim. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di tangan guru. Padahal, keterlibatan orang tua dalam membimbing dan memotivasi anak-anak mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik di sekolah maupun di rumah. Kurangnya komunikasi dua arah antara pihak sekolah dan wali murid menjadi hambatan dalam membangun sinergi pendidikan yang ideal (Wibowo, 2012).

Madrasah juga harus mampu beradaptasi dengan kebijakan pendidikan nasional yang terus berubah. Kebijakan Kurikulum Merdeka, digitalisasi pendidikan, dan evaluasi berbasis capaian menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah yang belum memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Ketika madrasah dituntut untuk setara dengan sekolah umum dalam penerapan kebijakan nasional, maka diperlukan bantuan dan perhatian khusus agar standar pendidikan di madrasah tidak tertinggal.

KESIMPULAN

Kebijakan sekolah gratis yang diimplementasikan di MTs Darul Aman Medan merupakan wujud nyata dari komitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Melalui penghapusan biaya SPP dan peminjaman perlengkapan sekolah seperti buku dan seragam, madrasah ini berhasil meringankan beban finansial orang tua siswa tanpa mengorbankan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menjadi langkah positif dalam mendukung pemerataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga membawa sejumlah implikasi terhadap kualitas pendidikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pengembangan fasilitas, pelatihan guru, serta inovasi kurikulum masih belum berjalan optimal. Meskipun akses terbuka luas, motivasi belajar siswa tidak merata dan evaluasi mutu pembelajaran belum dilakukan secara sistematis. Hal ini menuntut guru dan pihak sekolah untuk bekerja lebih keras dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan.

Tantangan yang dihadapi MTs Darul Aman dalam menjaga mutu pendidikan cukup kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi orang tua, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan kebijakan nasional yang terus berkembang. Namun, melalui komitmen dan sinergi antara semua pihak, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap.

Secara keseluruhan, kebijakan sekolah gratis memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Agar kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, dibutuhkan strategi berkelanjutan, manajemen yang profesional, dan dukungan dari semua pihak – baik pemerintah, sekolah, masyarakat, maupun orang tua siswa – untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan semakin luasnya akses yang diberikan.

REFERENSI

- Arianto, D. (2023). Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Islam. *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)*, 16(1), 15–27. <https://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/pai/article/view/329>
- Bayani Situmorang, H., Maymuhamna Rahayu, P., & Munawwarah, R. (2023). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 4(2), 117–120. <https://doi.org/10.30596/JPPP.V4I2.15475>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Reserch Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication Inc.
- Funfamily, M. P., & Mukhlis, M. (2024). Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyelenggarakan Pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022. *Journal of Education Research*, 5(1), 55–63. <https://doi.org/10.37985/JER.V5I1.681>
- Hariyadi, A. R. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/JDKP.V2I2.3887>
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122. <https://doi.org/10.58230/27454312.73>
- Imam Gojali, U. (2011). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan; 'menjual' mutu pendidikan dengan pendekatan quality control bagi pelaku lembaga pendidikan*. Ircisod.
- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). UPAYA KONVERGENSI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA PADANG. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), 109–116. <https://doi.org/10.24036/JMIAP.V3I2.245>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis*. UI Press.
- Mudlofir, A. (2016). Pendidikan Karakter: Konsep dan Aktualisasinya dalam Sistem Pendidikan Islam. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 229–246. <https://doi.org/10.21580/NW.2013.7.2.560>
- Omeri, N. (2015). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 9(3). <https://doi.org/10.33369/MAPEN.V9I3.1145>
- Rahmawati, Y. (2016). Intervensi Politik terhadap Kebijakan Pendidikan Pasca Reformasi. *AL-FURQAN*, 4(2), 1–14. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3199>
- Sanisah, S. (2015). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 3(1), 101–118. <https://doi.org/10.21009/JPEB.003.1.5>

- Solichin, M. (2015). Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2).
- Suryadi, A., & H.A.R Tilaar. (2003). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Syaripudin, T. (2012). *Ilmu Pendidikan*, . Pustaka Setia.
- W. Creswell, J. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1).
- Widyanto, I. (2022). Politik pendidikan: Respons kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(2). <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39940>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>